

**UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERKAIT *SHORTWEIGHTING* PADA PRODUK
MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI
KOTA TEGAL**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

DEVI ARIYANI

NPM 5116500048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT *SHORTWEIGHTING*
PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA
TEGAL**

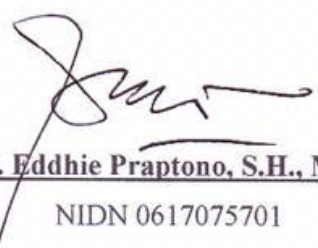
Devi Ariyani
NPM 5116500048

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing


Tegal, 27 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.

NIDN 0617075701


Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.

NIDN 0605037501

Mengetahui

Dekan,




Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

PENGESAHAN

**UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT *SHORTWEIGHTING*
PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA
TEGAL**

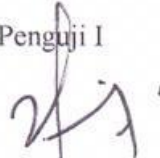
Devi Ariyani
NPM 5116500048


Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 27 Januari 2020

Penguji I

Penguji II


Kanti Rahayu, S.H., M.H.


Dr. Hamidah Abdurrahman, S.H.,
M.Hum.

NIDN 0620108203

NIDN 0022105601

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.


Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.

NIDN 0617075701

NIDN 0605037501

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Ariyani
NPM : 5116500048
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 5 Desember 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERKAIT *SHORTWEIGHTING* PADA
PRODUK MAKANAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA DI KOTA TEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Januari 2020

Yang menyatakan


(Devi Ariyani)

Abstrak

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya ketidaksesuaian pencantuman berat makanan yang terdapat pada label kemasan dengan berat yang sebenarnya.

Penelitian ini bertujuan: (1)mendeskripsikan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh konsumen terkait *shortweighting* pada produk makanan industri rumah tangga di Kota Tegal, (2)mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *shortweighting* yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan industri rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Dan dianalisis dengan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak pedagang/pelaku usaha yang menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya hak-hak konsumen, sehingga pihak yang sangat dirugikan disini adalah konsumen. Konsumen cenderung mempunyai kedudukan yang lemah, baik karena posisinya maupun karena awam terhadap aspek hukum secara umum, khususnya pada hak-hak yang seharusnya didapatkan sebagai konsumen. Adapun tindakan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pedagang/pelaku usaha yang menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang sebagian besar sebanyak hanya memilih diam saja, dan sebagian kecil konsumen memberikan teguran bagi pedagang bahwa tindakannya telah diketahui konsumen. Konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang tersebut, diatur secara umum pada UUPK, UU Pangan dan UU Metrologi Legal. Meskipun saksi telah diatur secara jelas akan tetapi pemerintah hanya memberikan sanksi berupa teguran. Perlindungan hukum bagi konsumen belum terpenuhi berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi akibat kerugian yang dialami konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Shortweighting*, Industri Rumah Tangga.

Abstract

The background of writing this thesis is the inclusion of inclusion of food weight contained on the packaging label with the actual weight.

This study aims to: (1)describe how the actions taken by consumers related to shortweighting on household industrial food products in the City of Tegal, (2)describe the form of legal protection against consumers related to shortweighting undertaken by household industrial food businesses.

This type of research is normative juridical research. The approach used is the fact approach and the statutory approach. Data collection techniques through the study of documentation, interviews and observations. And analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that there are still many traders/business actors selling products / goods that are not in accordance with the net weight, net or net content, and the amount in the calculation as stated on the label or label of the item. This shows that consumers' rights have not been fulfilled, so the parties who are most disadvantaged here are consumers. Consumers tend to have a weak position, both because of their position and because they are not familiar with the legal aspects in general, especially in the rights that should be obtained as consumers. As for the actions taken by consumers against traders/business actors who sell products/goods that are not in accordance with the net weight listed on the goods label, most of them choose to remain silent, and a small number of consumers give a warning to traders that their actions are known to consumers. The legal consequences for business actors selling products/goods that are not in accordance with the net weight listed on the label of the goods, are generally regulated in the UUPK, the Food Law and the Legal Metrology Law. Even though the witnesses have been clearly regulated, the government only sanctioned a warning. Legal protection for consumers has not been fulfilled relating to the right of consumers to obtain compensation due to losses suffered by consumers.

Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.

Keywords: Consumer Protection, Shortweighting, Home Industry.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu penulis tercinta, Bapak H. Daka dan Ibu Hj. Sumarni, terimakasih atas segala doa, dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia. *Aamiin.*
- Terkasih, kunci pintu surgaku kelak, Marbob Aziz terimakasih atas perhatian, doa dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga tujuan kita diridhoi Allah Swt. *Aamiin.*
- Saudara-saudara penulis.
- Seluruh teman-teman fakultas hukum senasib dan seperjuangan. Terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari penuh cobaan menjadi lebih berarti dan berwarna.

MOTTO

“Dicampakkan ilmu kedalam dada mereka, tetapi tidak dicampakkan cahaya kedalam hati mereka, bagi mereka yang menuntut ilmu untuk bermegah-megahan”.

(Al-Murobbi Al-Habib Umar bin Hafidz).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
6. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).

7. Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I), Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, calon suami serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 27 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	16
A. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen	16

B. Tinjauan tentang Konsumen.....	25
C. Tinjauan tentang Pelaku Usaha	32
D. Tinjauan tentang Industri Rumah Tangga.....	38
E. Tinjauan tentang Label	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh konsumen terkait	
<i>shortweighting</i> pada produk makanan industri rumah tangga.....	48
B. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait <i>shortweighting</i> yang	
dilakukan oleh pelaku usaha makanan industri rumah tangga	75
BAB IV PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Timbangan yang digunakan para pedagang/pelaku usaha
- Tabel 2 : Alasan pedagang/pelaku usaha dalam memilih timbangan yang digunakan
- Tabel 3 : Pedagang/pelaku usaha yang menggunakan timbangan bertanda tera sah
- Tabel 4 : Pedagang yang melakukan praktek curang
- Tabel 5 : Alasan pedagang menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat yang tercantum pada etiket barang
- Tabel 6 : Pedagang yang mengetahui aturan tentang larangan menjual produk yang tidak sesuai dengan berat bersih
- Tabel 7 : Monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag dan UPT Metrologi Legal sepanjang tahun 2019
- Tabel 8 : Pedagang/pelaku usaha yang mendapatkan sanksi dari Disperindag
- Tabel 9 : Tindakan/sanksi dari Disperindag dan UPT Metrologi Legal terhadap pedagang/pelaku usaha
- Tabel 10 : Konsumen yang menimbang kembali barang yang dibeli
- Tabel 11 : Barang yang dibeli tidak sesuai dengan berat bersih
- Tabel 12 : Konsumen yang pernah dirugikan oleh pedagang/pelaku usaha makanan industri rumah tangga
- Tabel 13: Konsumen yang mengajukan keluhan
- Tabel 14: Upaya penyelesain yang ditempuh konsumen
- Tabel 15: Hasil dari penyelesaian yang dilakukan konsumen yang dirugikan

Tabel 16: Pengetahuan konsumen mengetahui timbangan yang layak digunakan

Tabel 17: Pengetahuan konsumen tentang adanya perlindungan konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan adalah salah satu kebutuhan primer manusia selain sandang dan papan, makanan dalam hal ini mempunyai aspek penting bagi kehidupan manusia, tanpa makanan manusia tidak bisa melanjutkan hidupnya karena manusia membutuhkan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi.

Hal ini membuat para pelaku usaha yang bergerak dalam memproduksi dan pengolahan bahan makanan untuk dikonsumsi meningkat secara pesat dari tahun ke tahun. Salah satu industri yang bergerak di bidang makanan adalah industri rumah tangga. Industri makanan merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) khususnya di Kota Tegal.

Penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Industri Rumah Tangga Pangan adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu.

Pembangunan perekonomian yang diarahkan untuk mendukung tumbuhnya dunia usaha diharapkan mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus memberikan kepastian hukum atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan adanya kerugian terhadap konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang universal, mengingat kedudukan konsumen lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.¹

Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.²

¹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 1.

² Mochtar Kusumaatmaja, *Asas dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 89.

Ironisnya dalam realita dilapangan dengan mudah sering kita jumpai, pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk khususnya pangan memiliki kemasan yang lebih besar ukurannya dan tidak sebanding dengan isi dan juga informasi pada label kemasan, juga adanya ketidaksesuaian berat suatu barang yang tertera pada label dengan kenyataan yang sesungguhnya (untuk selanjutnya disebut *shortweighting*). *Shortweighting* adalah salah satu praktik penjualan barang yang merugikan konsumen. Dimana berat makanan yang sebenarnya adalah lebih kecil dari berat yang tertera pada label kemasan.³ Kasus yang penulis alami ketika penulis membeli produk makanan oleh-oleh khas Tegal yang diproduksi oleh UD. Sari Murni Tegal diantaranya stik jagung balado, opak singkong, dan sale pisang. Dengan berat masing-masing yang tertera pada label kemasan yaitu: stik jagung balado dan opak singkong dengan berat yang sama 200 gram, dan sale pisang dengan berat 500 gram. Namun berdasarkan fakta yang didapatkan oleh penulis ternyata berat/isi yang sebenarnya pada masing-masing produk tersebut yaitu: stik jagung balado hanya seberat 170 gram, opak singkong hanya seberat 182 gram, dan sale pisang hanya seberat 466 gram.

Konsumen jika hanya berpatokan pada fisik kemasannya maka akan salah besar. Dalam berbagai barang dalam keadaan terbungkus pada produk lain ada potensi terjadi hal yang sama sehingga merugikan konsumen, maka patut diwaspadai oleh konsumen serta perlunya pengawasan oleh instansi yang terkait agar tidak terjadi *misleading*. Konsumen semata-mata tergantung pada

³ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 404.

informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi, informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya.

Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Pentingnya pemasangan label atau pelabelan ataupun standarisasi mutu produk, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia.⁴

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

⁴ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 14.

3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Pasal 22 dan 23 telah mengatur tentang barang dalam keadaan terbungkus. Penjelasan Pasal 22 sangat gamblang dan lugas dalam memberikan penjelasan mengenai alasan keharusan perlunya pencantuman ukuran, berat bersih, isi bersih, jumlah yang sebenarnya terhadap barang dalam keadaan terbungkus.

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya atau yang selanjutnya disingkat yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan daritera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.

Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Metrologi Legal yaitu bila suatu barang dijual berdasarkan ukuran berat atau isi dimasukkan dalam bungkus, akan memberikan kesulitan bagi pembeli untuk mengetahui secara pasti ukuran, berat, isi bersih atau jumlah dalam bungkus.

Ukuran besarnya bungkus tidak selalu memberikan anggapan yang benar tentang ukuran, berat bersih, isi bersih, atau jumlahnya. Tanpa memberitahukan atau menonjolkan ukuran, berat bersih, isi bersih, atau jumlah

akan menimbulkan keraguan bagi pemakai barang (konsumen) dalam membeli barang-barang dalam keadaan terbungkus.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT *SHORTWEIGHTING* PADA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA TEGAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh konsumen terkait *shortweighting* pada produk makanan industri rumah tangga di Kota Tegal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *shortweighting* yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan industri rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis meneliti permasalahan tersebut adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh konsumen terkait *shortweighting* pada produk makanan industri rumah tangga di Kota Tegal.

2. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *shortweighting* yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan industri rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan dibidang ilmu hukum bagi para akademisi kekhususan perdata dan mengkaji lebih dalam teori-teori hukum perdata khususnya mengenai perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan praktisi khususnya bagi pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga dan masyarakat/konsumen sehingga dapat mengetahui informasi yang terdapat dalam tulisan ini, memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai pengaturan *shortweighting* dalam undang-undang.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Rendy Aditya Pechler, Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk

Makanan Dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fonny). Dalam skripsi ini dipaparkan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengurangan timbangan makanan dalam kemasan ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap pengurangan berat bersih timbangan makanan tersebut.⁵

2. Ayu Ratnasari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Isi Produk Biskuit Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih Pada Label Kemasan*. Dalam skripsi ini dipaparkan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk biskuit yang tidak sesuai dengan berat bersih pada label kemasan serta pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap isi produk biskuit yang tidak sesuai dengan berat bersih pada label kemasan.⁶
3. Rose Linda Elvira, Fendy Setyawan dan Yusuf Adi Wibowo, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*. Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran hak-hak konsumen

⁵ Rendy Aditya Pechler, "Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fonny)", Skripsi Sarjana Hukum, Surabaya, 2011.

⁶ Ayu Ratnasari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Isi Produk Biskuit Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih Pada Label Kemasan", Skripsi Sarjana Hukum, Jember, 2018.

akibat pengurangan berat bersih timbangan dalam kemasan produk makanan yang diproduksi.⁷

4. Komang Prayuda Devi Kurniawati dan I Gede Putra Ariana, Ketidaksesuaian Pencantuman Ukuran Yang Terdapat Pada Kemasan Dengan Produk Aslinya (Studi Pada Mini Mart Di Sesetan Denpasar). Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan produk Laurier yang tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya.⁸
5. Hendri dan Neneng Oktarina, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kemasan Pelaku UMKM Yang Tidak Mencantumkan Label Pangan. Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap beredarnya produk makanan olahan UMKM yang tidak berlabel makanan BPOM di Kota Bukittinggi.⁹
6. Ernawati, Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Pangan Industri Rumah Tangga. Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana pengawasan hak konsumen atas keamanan dalam mengkonsumsi makanan olahan industri rumah tangga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

⁷ Rose Linda Elvira, *et al.*, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2013.

⁸ Komang Prayuda Devi Kurniawati dan I Gede Putra Ariana, “Ketidaksesuaian Pencantuman Ukuran Yang Terdapat Pada Kemasan Dengan Produk Aslinya (Studi Pada Mini Mart Di Sesetan Denpasar)”, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2017.

⁹ Hendri dan Neneng Oktarina, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kemasan Pelaku UMKM Yang Tidak Mencantumkan Label Pangan”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2018.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga terkait di Kabupaten Buton Utara.¹⁰

7. Hendra Muttaqin, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang. Dalam skripsi ini dipaparkan bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang dan pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen.¹¹
8. Suryadiansyah S., Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Label Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Provinsi Riau. Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan akibat hukum terhadap produk yang tidak sesuai dengan syarat pelabelan menurut BPOM.¹²
9. Raifina Oktiva dan Susiana, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Dalam jurnal ini dipaparkan tentang faktor penyebab dan akibat hukum pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kota Banda Aceh yang tidak

¹⁰ Ernawati, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Pangan Industri Rumah Tangga", *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2017.

¹¹ Hendra Muttaqin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang", Skripsi Sarjana Hukum, Semarang, 2016.

¹² Suryadiansyah S., "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Label Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Provinsi Riau", *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2017.

mencantumkan label komposisi dan upaya hukum yang dilakukan oleh instansi terkait.¹³

10. Asri Wahyu Thahara, *Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)*. Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga, faktor penghambat yang dialami dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.¹⁴

Yang membedakan dari penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan oleh konsumen serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen terkait *shortweighting* pada produk makanan industri rumah tangga.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan disertai dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data penunjang dalam penulisan skripsi. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum

¹³ Raifina Oktiva dan Susiana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2018.

¹⁴ Asri Wahyu Thahara, "Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)", *Jurnal Hukum*, 2013.

ke pustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan fakta (*the fact approach*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

1. Pendekatan fakta (*the fact approach*), yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

c. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Didalam metode penelitian normatif ini, terdapat tiga macam bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 2009, hlm. 13.

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, hasil penelitian dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman, pengertian maupun penjelasan terhadap bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum lengkap.

d. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, tulisan-tulisan para sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian turun ke lapangan untuk mendapatkan data primer yang

sesuai dengan masalah penelitian ini. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara:

1) Teknik wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶

Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pedagang/pelaku usaha, konsumen serta Kepala Seksi Perdagangan Disperindag Kota Tegal.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian.¹⁷ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

¹⁶ Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rsodakarya, 2017, hlm. 135.

¹⁷ Romy Hanitjo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 62.

tema yang disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

G. Sistematika Penulisan

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual, pada bab ini berisi tentang teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu tinjauan tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha, Industri Rumah Tangga, dan Label.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai tindakan yang dilakukan oleh konsumen terkait *shortweighting* pada produk makanan industri rumah tangga di Kota Tegal serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *shortweighting* yang dilakukan oleh pelaku usaha makanan industri rumah tangga.

Bab IV Penutup, bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, serta saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum

perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah :

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.”

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai :

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.¹⁸

Menurut Janus Sidabalok mengartikan hukum perlindungan konsumen yakni :

“Keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen”.¹⁹

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi

¹⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002, hlm. 22.

¹⁹ *Ibid.*

produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.²⁰

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia. Sedangkan, di negara maju hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UUPK, disebutkan :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.²¹

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-4, 2014, hlm. 5.

²¹ Jeanus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 7.

A. Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :²²

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Konsumen mempunyai hak.
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban.
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional.
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat.
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa.
- g. Pemerintah perlu berperan aktif.
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta.
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang.
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitu pula menurut H.J. Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit,

²² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 4.

melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Mirip dengan pendapat itu, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Asas-asas hukum merupakan sebuah fondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Apabila asas-asas hukum yang menjadi fondasi tersebut dikesampingkan maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen secara lebih rinci, sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 2 UUPK.²³ Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yaitu sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu :²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 9-10.

²⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet.ke-7, 2014, hlm. 192.

1) Asas Manfaat

Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasakan adanya diskriminasi.

Asas ini juga menghendaki bahwa agar didalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain atau sebaliknya, akan tetapi asas ini menghendaki agar perlindungan konsumen tersebut juga diberikan kepada masing-masing pihak, baik pihak produsen maupun konsumen apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi para pihak yang bersengketa sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan dalam perlindungan konsumen ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen (pelaku usaha) untuk dapat memperoleh haknya masing-masing, dan juga

melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

Asas keadilan ini menghendaki bahwa dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tersebut, antara konsumen dan produsen (pelaku usaha) dapat berlaku adil melalui perolehan hak maupun pelaksanaan kewajibannya yang dilakukan secara seimbang, oleh karena itulah UUPK telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun produsen (pelaku usaha).

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen (pelaku usaha), dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, produsen (pelaku usaha), dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen (pelaku usaha), dan pemerintah tersebut harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak maupun kewajibannya masing-masing didalam pergaulan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian didalam asas keseimbangan ini tidak akan ada salah satu pihak yang mendapatkan perlindungan hukum atas kepentingannya

yang lebih besar daripada pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen didalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Kedua asas ini menghendaki agar dengan adanya jaminan hukum tersebut, maka konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya, sehingga produk barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi tersebut tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya. UUPK membebaskan sejumlah kewajiban maupun larangan yang harus dipatuhi oleh produsen (pelaku usaha) didalam memproduksi dan mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik produsen (pelaku usaha) maupun konsumen dapat menaati hukum serta memperoleh keadilan didalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara yang memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian dapat diartikan bahwa UUPK ini mengharapkan agar aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup masyarakat dan kehidupan sehari-

hari sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh keadilan, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang.²⁵

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen (masyarakat), produsen (pelaku usaha), dan juga pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Lebih lanjut ketika membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen maka sudah tentu akan membahas juga mengenai apa saja yang menjadi asas dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri.

Sesuai dengan Pasal 3 UUPK, tujuan dari perlindungan konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

²⁵ Jeanus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 11-12.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.²⁶

B. Tinjauan tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris) dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Berikut adalah pengertian konsumen menurut para ahli :

- a. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler, dalam bukunya *Prinsiples Of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.

²⁶ Sudjana dan Elisantris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: CV. Keni Media, 2016, hlm. 82-83.

- b. Pengertian konsumen menurut Tri Kunawangsih dan Anto Pracoyo, konsumen adalah mereka yang memiliki daya beli, yakni berupa pendapatan dan melakukan permintaan terhadap barang dan jasa.
- c. Pengertian konsumen menurut Djokosantoso Moeljono, konsumen adalah seseorang yang secara terus menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama, untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk, atau mendapatkan suatu jasa, dan membayar produk atau jasa tersebut.

Sedangkan menurut bab I, Ketentuan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain.

Berdasarkan pengertian diatas subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*recht person*). Menurut Az. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang alami bukan badan hukum, sebab yang memakai menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri,

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.²⁷

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh produsen, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.²⁸

2. Hak Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan hukum itu bukan sekedar fisik melainkan termasuk juga hak-haknya bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.²⁹

Secara umum dikenal empat hak dasar konsumen yang diakui secara internasional. Hak-hak yang dimaksud adalah :

²⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusamedia, Cet. ke-1, 2010, hlm. 30-31.

²⁸ Jeanus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 14-15.

²⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 19.

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*The right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*The right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*The right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*The right to be heard*)

Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan ganti kerugian, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan untuk sehat.

Signifikasi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dapat disingkat UUD NRI 1945, disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas. Melalui UUPK menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan didalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar,

memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Hak-hak dalam UUPK diatas merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD NRI 1945.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia” yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.³⁰

3. Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan

Adapun kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan padanya.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *op. cit.*, hlm. 33-34.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hamper tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk

mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.³¹

C. Tinjauan tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, *leveransir* dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.³²

Menurut UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, pengertian pelaku usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUPK. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya.³³

³¹ Abdul Halim Barkatullah, *op. cit.*, hlm. 48-50.

³² Jeanus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 13.

³³ Eli Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2015, hlm. 57-58.

2. Hak Pelaku Usaha

Sementara itu hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban produsen atau pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya

Kewajiban beritikad baik berarti produsen atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melakukannya dengan itikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan serta dengan penuh tanggung jawab.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

Kewajiban memberi informasi berarti produsen atau pelaku usaha wajib memberi informasi kepada masyarakat atau konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Kewajiban melayani berarti produsen atau pelaku usaha wajib memberi pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

Kewajiban memberi kesempatan berarti produsen atau pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan

membeli atau tidak membeli dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

Kewajiban memberi kompensasi berarti produsen atau pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuai dengan produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

4. Perbuatan Yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen untuk maksud meningkatkan tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.³⁴

Berdasarkan UUPK, Pasal 8 perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 54.

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 undang-undang tersebut dapat kita bagi kedalam dua larangan pokok, yaitu :

- 1) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk diperdagangkan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Larangan mengenai kelayakan produk baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut kadang-kadang sudah ada yang menjadi “pengetahuan umum”, namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.³⁵

D. Tinjauan tentang Industri Rumah Tangga

1. Pengertian Industri Rumah Tangga

Sebelum membahas tentang industri rumah tangga perlu kita ketahui terlebih dulu tentang klasifikasi industri. Klasifikasi industri mempermudah untuk mengelompokkan jenis industri dari salah satu aspek. Sehingga mempercepat untuk mengenali industri tersebut dan mudah untuk membedakan satu industri dengan industri yang lainnya, termasuk klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja.

Industri rumah tangga masuk dalam klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, karena industri ini menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *op. cit.*, hlm. 42-44.

biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan.

Menurut Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.1639 tentang pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) menerangkan bahwa :

“Industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”.³⁶

2. Tujuan Pembangunan Industri

Dalam pandangan umum, pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.

³⁶ Hendra Muttaqin, *op. cit.*, hlm. 28.

- 3) Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
- 4) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
- 5) Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri.
- 6) Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
- 7) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan wawasan nusantara.
- 8) Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.³⁷

3. Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)

Menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman CPPB-IRT bahwa :

“Setiap industri rumah tangga dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib berpedoman pada Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini”.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga adalah :

a. Lingkungan Produksi

Untuk menetapkan lokasi industri rumah tangga perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya.

b. Bangunan dan Fasilitas Industri Rumah Tangga

Bangunan dan fasilitas industri rumah tangga dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis dan kimia serta mudah dibersihkan dan disanitasi.

c. Peralatan Produksi

Tata letak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan produksi yang kontak langsung dengan pangan seharusnya didisain, dikonstruksi dan diletakkan sedemikian untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan.

d. Suplai Air

Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum.

e. Fasilitas, Kegiatan *Higiene* dan Sanitasi

Fasilitas, kegiatan *higiene* dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.

f. Pengendalian Hama

Hama (tikus, serangga, dan lain-lain) merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan.

g. Kesehatan dan *Higiene* Karyawan

Kesehatan dan *higiene* karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran.

h. Pengendalian Proses

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Penetapan spesifikasi bahan baku;
- 2) Penetapan komposisi dan formulasi bahan;
- 3) Penetapan cara produksi yang baku;
- 4) Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan;
- 5) Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluwarsa.

i. Label Pangan

Label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan.

- 1) Label pangan yang dihasilkan Industri Rumah Tangga harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 2) Keterangan pada label sekurang-kurangnya:
 - Nama produk
 - Daftar bahan yang dihasilkan (komposisi)
 - Berat bersih atau isi bersih
 - Nama dan alamat pihak yang memproduksi
 - Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa
 - Nomor sertifikasi produksi

j. Penyimpanan

Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk pangan yang diolah.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

E. Tinjauan tentang Label

1. Pengertian Label

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, ukuran, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, berat isi bersih (netto), aturan pakai, akibat sampingan dan nama alamat usaha serta keterangan untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.³⁹

Adapun label sebagai sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan dan sebagai konsumen yang baik dan cerdas, kita harus membaca dan memperhatikan label terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan apa sajakah yang terdapat dalam makanan tersebut.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa :

“Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”,

yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label.

2. Fungsi Label

Fungsi label adalah :

- 1) Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-undang bahan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

makanan dan minuman atau obat. Pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang bahan makan.

- 2) Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana.
- 3) Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan, untuk mengatasi hal ini maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya.
- 4) Bagi produsen label dipergunakan untuk alat promosi dan pengenalan terhadap barang tersebut.

3. Pengaturan Tentang Label

Pengaturan tentang label didalam perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UUPK, yang berbunyi :

“Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.

Sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) UUPK, pengaturan mengenai label diperkuat juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 43, serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

HK.00.05.5.1639 tentang pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).⁴⁰

4. Arti Penting Label

Konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi barang dan jasa. Dan setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label, diluar atau didalam kemasan pangan. Serta usaha yang wajib mencantumkan nama dan alamat pangan ialah produsen pangan, importir, pengedar produk pangan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang lengkap yaitu baik importir pangan yang bersangkutan. Selama produk makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Hal ini agar konsumen makanan/minuman dapat mengetahui apakah barang tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak hal ini tertera dalam ketentuan kadaluarsa menurut UUPK.

Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya pangan yang diproduksi didalam negeri, berlaku juga terhadap pangan yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Tujuannya adalah agar informasi tentang pangan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan halal menurut UUPK, yaitu pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

berproduksi secara halal yang di cantumkan dalam label. Untuk mendukung pernyataan halal, produsen wajib memeriksakan pangan pada lembaga pemeriksa yang sudah terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian para konsumen membiasakan diri untuk membaca label tersebut karena dengan membaca label akan diketahui isi bungkus/wadah barang tersebut. Karena hampir semua makanan jadi yang dijual dipasaran berada dalam kemasan sehingga konsumen tidak dapat memeriksa apa dan bagaimana keadaan isinya waktu membeli.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 36.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Yang Dilakukan oleh Konsumen Terkait *Shortweighting* pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga

Perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Peranan pelaku usaha dan konsumen sangat mendorong majunya perekonomian dan meningkatnya pembangunan suatu negara. Sehingga pelaku usaha dan konsumen dituntut untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti menjual barang yang sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label. Di dalam peraturan produk/barang pangan berupa keperluan konsumen, ditentukan bahwa produk yang akan diperdagangkan atau dipasarkan harus memenuhi standar ketentuan yang telah ditentukan didalam perundang-undangan, tujuannya ialah untuk mengupayakan agar barang yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar.

Saat ini, berbagai macam cara penjualan dilakukan oleh pelaku usaha untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan atau untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan suatu produk makanan industri rumah tangga, dengan mengupayakan produk yang dipasarkan dengan bentuk yang menarik dan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga dimata

konsumen produk makanan industri rumah tangga tersebut mempunyai daya tarik tersendiri.

Peredaran produk makanan industri rumah tangga yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) UUPK termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Di masyarakat tingkat penggunaan produk makanan industri rumah tangga yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut yang relatif tinggi. Situasi yang demikian seharusnya dapat segera diatasi oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap peredaran produk makanan industri rumah tangga yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang dan tingginya tingkat penggunaan masyarakat/konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Perlu diketahui penyebab produk makanan industri rumah tangga yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut masih beredar dikalangan masyarakat khususnya di Kota Tegal.

Setiap pedagang/pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan, tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada etiket barang tersebut.

Padahal dalam UUPK Pasal 8 huruf (b) sudah jelas diatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, untuk tidak memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang, tapi pada kenyataannya masih banyak pedagang/pelaku usaha yang masih melanggar peraturan tersebut.

Hingga saat ini perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran oleh pedagang/pelaku usaha, dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih tegas dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus segera menangani masalah ini sebelum akhirnya semua konsumen harus menanggung kerugian yang lebih berat akibat efek samping dari tidak adanya perlindungan konsumen atau jaminan terhadap konsumen, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap 5 produsen/pelaku usaha yang menjual produk makanan industri rumah tangga dan 3 konsumen yang membeli produk makanan industri rumah tangga tersebut dengan melakukan studi wawancara dan observasi, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen makanan industri rumah tangga tersebut. Misalnya saja mengurangi berat timbangan dan tidak menara ulang atau bahkan tidak pernah menara

timbangan yang digunakan untuk menimbang produk makanan yang akan dijual.

Beberapa tabel persentase hasil informasi yang diperoleh dari 5 pedagang/pelaku usaha dalam bentuk wawancara dan observasi, adalah:

Tabel 1
Timbangan yang digunakan para produsen pangan industri rumah tangga

No.	Jenis timbangan	Jumlah	Persentase
1.	Jarum	5	100%
2.	Gantung	0	0
3.	Digital/Elektronik	0	0
4.	Timbangan plastik atau “kue”	0	0
n = 5			100%

Sumber: Hasil data lapangan yang diolah (produsen makanan industri rumah tangga).

Berdasarkan tabel 1. Dapat dilihat bahwa 100% pedagang/pelaku usaha menggunakan timbangan duduk atau jarum dan tidak ada yang menggunakan timbangan elektronik, timbangan gantung, ataupun yang menggunakan timbangan plastik atau “kue” dengan skala 2 (dua) kg yang sudah tidak diperkenankan digunakan dalam berdagang. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Pasal 32 perdagangan yang menggunakan timbangan plastik atau “kue” tersebut dapat dikenakan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda

setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini dikarenakan untuk menghindari kerugian akibat tidak akurat dalam menimbang.

Adapun alasan pedagang/pelaku usaha dalam memilih timbangan tersebut bervariasi, dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2

Alasan produsen/pelaku usaha dalam memilih timbangan yang digunakan

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Lebih mudah digunakan	4	80%
2.	Lebih dipercaya konsumen	1	20%
3.	Lebih murah	0	0
n = 5			100%

Sumber: Hasil data lapangan yang diolah (produsen makanan industri rumah tangga).

Berdasarkan tabel 2. Menunjukkan bahwa menurut sebagian besar pedagang/pelaku usaha yaitu 80% memilih timbangan yang digunakan lebih mudah digunakan, sedangkan 20% pedagang/pelaku usaha memilih timbangan dengan alasan lebih dipercaya konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan konsumen seperti rasa nyaman dan percaya dari konsumen belum menjadi prioritas utama.

Adapun pedagang/pelaku usaha yang menggunakan timbangan yang sudah ditera dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3**Pedagang yang menggunakan timbangan bertanda tera sah**

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Bersegel	2	40%
2.	Tidak bersegel	3	60%
n = 5			100%

Sumber: Hasil data lapangan yang diolah (produsen makanan industri rumah tangga).

Berdasarkan tabel 3. Dapat dilihat 60% pedagang/pelaku usaha menggunakan timbangan yang tidak bersegel, sedangkan hanya 40% pedagang/pelaku usaha yang menggunakan timbangan yang bersegel. Berarti tingkat intensitas pedagang/pelaku usaha yang menggunakan timbangan tidak bersegel lebih tinggi dari pada pedagang/pelaku usaha yang menggunakan timbangan yang bersegel. Timbangan pada umumnya cenderung mudah rusak oleh karena itu, perlu dilakukan tera ulang secara berkala. Berdasarkan Undang-Undang Metrologi legal harus dilakukan tera timbangan minimal satu tahun sekali. Selain itu tera dan tera ulang juga untuk menandakan timbangan tersebut layak atau tidak digunakan. Timbangan yang layak digunakan adalah timbangan yang bertanda tera atau bersegel.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Pasal 25 huruf (b) yang berbunyi: dilarang mempunyai, menaruh, memakai atau menyuruh memakai, alat-alat ukur, takar,

timbangan dan/atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku. Dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Metrologi legal.

Adapun para pedagang/pelaku usaha yang melakukan praktek curang dalam menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

Pedagang/pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam menjual produk yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Melakukan	4	80%
2.	Tidak melakukan	1	20%
n = 5			100%

Sumber: Hasil data lapangan yang diolah (produsen makanan industri rumah tangga).

Berdasarkan tabel 4. Menunjukkan bahwa 80% pedagang melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam mengurangi timbangan dengan menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada etiket barang yang diperdagangkan. Sedangkan sebagian kecil

sebanyak 20% pedagang/pelaku usaha yang tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Adapun produk makanan yang dikurangi seperti stik jagung, opak singkong, sale pisang dan kerupuk. Sudah seharusnya pemerintah harus lebih tegas dalam melindungi konsumen. Akan tetapi sampai saat ini kepedulian pemerintah masih sangat kurang. Sehingga masih banyak pedagang/pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang yaitu mengurangi timbangan.

Adapun alasan para pedagang/pelaku usaha melakukan praktek curang dalam mengurangi berat timbangan bervariasi, dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5

Alasan pedagang/pelaku usaha menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada etiket barang tersebut

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Untuk mendapatkan keuntungan lebih	3	60%
2.	Menghemat biaya produksi	0	0%
3.	Tidak ingin rugi	2	40%
n = 5			100%

Sumber: Hasil data lapangan yang diolah (produsen makanan industri rumah tangga).

Berdasarkan tabel 5. Menunjukkan bahwa 60% pedagang/pelaku usaha mengatakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, sedangkan 40% pedagang/pelaku usaha mengatakan tidak ingin rugi. Sehingga para pedagang/pelaku usaha menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada etiket barang yang diperdagangkan. Hal ini bertentangan dengan UUPK yang sudah sangat jelas mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Sudah seharusnya pedagang mengetahui peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Adapun persentasenya dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 6

Pedagang/pelaku usaha yang mengetahui aturan tentang larangan menjual produk yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada etiket barang

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui	2	40%
2.	Tidak mengetahui	2	40%
3.	Pura-pura tidak mengetahui	1	20%
n = 5			100%

Sumber: Hasil data lapangan yang diolah (produsen makanan industri rumah tangga).

Berdasarkan tabel 6. Menunjukkan bahwa sebanyak 40% pedagang/pelaku usaha yang mengetahui tentang aturan larangan menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada etiket barang. Sedangkan sebanyak 20% pedagang pura-pura tidak mengetahui dan sebagian 40% pedagang/pelaku usaha tidak mengetahui tentang aturan larangan menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang. Padahal dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) UUPK sudah jelas mengatur larangan bagi pelaku usaha memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang. Peran pemerintah untuk mensosialisasikan UUPK masih kurang.

Selain itu, kurangnya sosialisasi, pengawasan dan pengontrolan kepada pelaku usaha yang tidak berjalan maksimal sehingga masih banyak terjadinya kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh pedagang/pelaku usaha. Adapun monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7

**Monitoring atau pengawasan yang dilakukan Disperindag dan UPT
Metrologi Legal sepanjang tahun 2019**

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	1 kali	2	40%
2.	2 kali	0	0%
3.	3 kali	0	0%
4.	Tidak ada	3	60%
n = 5			100%

Sumber: Hasil data lapangan yang diolah (produsen makanan industri rumah tangga)

Berdasarkan tabel 7. Menunjukkan bahwa 40% saja pedagang/pelaku usaha yang mengatakan pernah ada monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Sedangkan sebanyak 60% menyatakan tidak pernah ada monitoring atau pengawasan yang dilakukan instansi terkait. Padahal monitoring atau pengawasan terhadap timbangan haruslah dilakukan secara berkala terhadap timbangan para pedagang/pelaku usaha, tapi pada implementasinya monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait tidaklah optimal, sehingga masih banyak pedagang/pelaku usaha yang menggunakan timbangan yang tidak bersegel atau bertera sah. Sehingga praktek curang dalam mengurangi timbangan masih saja dilakukan oleh pelaku usaha.

Menurut Bapak Ari Prasetya selaku Kepala Seksi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Tegal. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang berwenang menangani hal ini, serta luasnya jangkauan pemerintah di Kota Tegal. Salah satu upaya untuk mengurangi praktek curang dalam timbangan adalah dengan memberikan sanksi sebagai peringatan dan efek jera bagi pedagang/pelaku usaha curang tersebut maupun pedagang/pelaku usaha yang lain. Maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah yang berwenang untuk menindak pedagang/pelaku usaha tersebut, maka dalam hal ini Disperindag melakukan serangkaian pengawasan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Tegal, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 36 yang berbunyi: “pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Tugas pengawasan dan pengamatan serta penyidikan, dapat dilakukan secara berkala, dengan operasi mendadak (sidak), atau apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang metrologi legal.

Adapun pedagang/pelaku usaha yang pernah mendapatkan tindakan dari instansi terkait dalam penggunaan timbangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8

**Pedagang/pelaku usaha yang mendapat sanksi dari Disperindag dan UPT
Metrologi Legal**

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	2	40%
2.	Tidak pernah	3	60%
n = 5			100%

Sumber: Hasil data lapangan yang diolah (produsen makanan industri rumah tangga).

Berdasarkan tabel 8. Menunjukkan sebagian besar pedagang/pelaku usaha 3 pedagang (60%) yang tidak pernah mendapatkan sanksi, dan sebagian kecil 2 orang pedagang/pelaku usaha (40%) yang menyatakan pernah mendapatkan sanksi dari pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesalahan yang dilakukan pedagang mengenai timbangan cukup rendah, serta kesadaran akan hukum cukup baik.

Tindakan atau sanksi yang diberikan Disperindag dan UPT Metrologi Legal terhadap pedagang/pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam penggunaan timbangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9

Tindakan/sanksi dari Disperindag dan UPT Metrologi Legal terhadap pedagang/pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam penggunaan timbangan

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Peringatan	1	50%
2.	Pembinaan	1	50%
3.	Sanksi administratif	0	0%
n = 2			100%

Sumber: Hasil data lapangan yang diolah (produsen makanan industri rumah tangga).

Berdasarkan tabel 9. Menunjukkan bahwa 100% sanksi yang diberikan kepada pedagang/pelaku usaha adalah teguran dan sanksi pembinaan, sedangkan sanksi administratif tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Prasetya Kepala Seksi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal, tindakan pedagang/pelaku usaha yang diketahui melakukan pelanggaran mengenai timbangan sanksinya berupa teguran dan pembinaan, namun sanksi administratif dan menyita timbangan merupakan sanksi yang jarang diberikan karena masih dalam batas toleransi yang diijinkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Bapak Ari Prasetya, menyatakan bahwa terhadap pelaku pedagang/pelaku usaha atas produk atau barang yang melanggar ketentuan, maka dari Disperindag akan memberikan saksi berupa:

1. Produk/barang tidak boleh dipajang;
2. Memberikan teguran kepada pelaku usaha terakhir;
3. Apabila teguran terlulis tidak diindahkan/dihiraukan berturut-turut tiga kali, maka pemerintah Kota Tegal akan membekukan izin usaha melewati Badan Perizinan Pelayanan Terpadu.⁴²

Adanya perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pedagang/pelaku usaha, tetapi sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang/jasa yang berkualitas. Seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Sanksi diperlukan sebagai peringatan agar pelaku usaha/pedagang bertindak secara benar. Selain itu, peran aktif konsumen dalam memperhatikan barang/produk yang dibeli juga sangat penting untuk menghindari kerugian. Salah satu tindakan sederhana

⁴² Wawancara dengan Ari Prasetya, Kepala Seksi Perdagangan Disperindag Kota Tegal, tanggal 13 Desember 2019 jam 10.00 –11.30 WIB.

yang dapat dilakukan konsumen yaitu menimbang kembali berat barang yang dibeli dari pedagang/pelaku usaha sebelum mulai berlangganan.

Adapun konsumen yang melakukan hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10
Konsumen yang menimbang kembali produk/barang yang dibeli dari pedagang/toko

No.	Alternatif	Jumlah	Presentase
1.	Menimbang kembali	1	20%
2.	Tidak menimbang kembali	2	80%
n = 3			100%

Sumber: Data lapangan yang diolah (konsumen).

Berdasarkan tabel 10. Dapat dilihat bahwa sebesar 20% konsumen yang biasanya menimbang kembali berat timbangan barang yang dibeli dan sebagian besar 80% menyatakan tidak pernah. Berarti tingkat intensitas konsumen yang tidak pernah menimbang kembali barang yang dibeli lebih tinggi dari pada konsumen yang biasa menimbang kembali berat timbangan barang yang dibeli. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak konsumen yang tidak kritis untuk mengetahui kepastian terpenuhi haknya dengan menimbang kembali berat barang yang dibeli. Padahal menjadi konsumen cerdas selain untuk mengantisipasi terjadinya kerugian, juga mendorong pedagang/pelaku usaha

untuk lebih berhati-hati dan memenuhi hak-hak konsumen sehingga dapat mencegah terjadinya praktik curang. Konsumen yang biasa menimbang kembali barang yang dibeli, dapat mengetahui apakah konsumen tersebut pernah dirugikan karena berat timbangan barang tersebut tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada etiket barang tersebut.

Tingkat kesadaran konsumen terhadap produk/barang yang dibeli tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada etiket barang atau tidak sesuai dengan timbangan:

Tabel 11

Barang yang dibeli tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Sesuai berat bersih	0	0%
2.	Tidak sesuai berat bersih	3	100%
n = 3			100%

Sumber: Data lapangan yang diolah (konsumen)

Berdasarkan tabel 11. Menunjukkan bahwa 100% konsumen yang membeli produk/barang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen belum memperoleh haknya sebagai konsumen salah satunya untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Kesadaran konsumen bahwa konsumen memiliki hak, kewajiban serta perlindungan hukum atas konsumen harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atas konsumen. Agar konsumen mengetahui akan hak-haknya serta kewajibannya sebagai konsumen.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh para pedagang/pelaku usaha akibat produk/barang yang dibeli tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang tersebut, dapat dilihat pada label dibawah ini:

Tabel 12

Konsumen yang pernah dirugikan oleh pedagang/pelaku usaha makanan olahan industri rumah tangga

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Merasa dirugikan	2	80%
2.	Tidak merasa dirugikan	1	20%
n = 3			100%

Sumber: Data lapangan yang diolah (konsumen)

Berdasarkan tabel 12. Menunjukkan bahwa masih ada konsumen yang merasa dirugikan terhadap produk/barang yang dibelinya tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang tersebut dan persentasenya sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang/pelaku usaha belum memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen. Sedangkan 20% konsumen menyatakan tidak merasa dirugikan walaupun produk/barang

yang dibelinya tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang tersebut.

Salah satu faktor penyebab masih ditemukan praktek curang dalam penggunaan timbangan dikarenakan konsumen yang bersikap acuh atas perbuatan pedagang/pelaku usaha tersebut. Sehingga konsumen cerdas tidak hanya melakukan menimbang ulang berat barang yang dibeli, tetapi juga mengungkapkannya kepada pedagang tersebut perihal berat timbangan kurang.

Adapun konsumen yang mengajukan keluhan karena telah dirugikan oleh pedagang/pelaku usaha, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 13

Konsumen yang mengajukan keluhan akibat berat timbangan dikurangi oleh pedagang/pelaku usaha makanan industri rumah tangga

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Pernah mengajukan	2	80%
2.	Tidak pernah mengajukan	1	20%
n = 3			100%

Sumber: Data lapangan yang diolah (konsumen).

Berdasarkan tabel 13. Mengenai tindakan konsumen yang mengalami kerugian yaitu sebanyak 80% pernah melakukan keluhan kepada pedagang/pelaku usaha dan sebanyak 20% yang tidak pernah mengajukan keluhan kepada pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat

untuk memperjuangkan haknya untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan sudah cukup maksimal. Lazimnya konsumen yang dirugikan akan beralih ke pedagang/pelaku usaha lain tanpa mengeluhkan atau komplek kepada pedagang/pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian baginya, tetapi membiarkan dan menganggapnya sebagai pengalaman buruk, dengan suatu pemikiran bahwa sikap yang diambil ini akan jauh lebih baik dari pada menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Dengan kondisi yang sangat terbatas, maka konsumen tidak mempunyai pilihan dalam memilih suatu produk, termasuk produk yang merugikan dirinya, perilaku konsumen ini disebut nir aksi tidak berkepentingan untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar, sehingga lebih cenderung akan tetap diam.

Adapun upaya yang dilakukan konsumen untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 14

Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen yang dirugikan

No.	Alternatif	Jumlah	Presentase
1.	Jalur hukum	0	0%
2.	Jalur kekeluargaan	0	0%
3.	Jalur musyawarah	2	100%
n = 2			100%

Sumber: Data lapangan yang diolah (konsumen).

Berdasarkan tabel 14. Menunjukkan bahwa konsumen yaitu sebanyak 100% upaya penyelesaian yang ditempuh konsumen memilih diselesaikan lewat jalur musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi konsumen cukup tinggi karena konsumen cenderung menghindari terjadinya sengketa yang berkepanjangan. Adapun tindakan mengabaikan tanpa adanya penyelesaian dari konsumen dapat memicu ketidakadilan terhadap konsumen terus terjadi bahkan cenderung meningkat, karena pedagang/pelaku usaha akan beranggapan bahwa mereka bebas dari tanggung jawab terhadap apapun bahkan untuk pertanggung jawaban secara moral.

Adapun hasil penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pedagang/pelaku usaha yang mengurangi timbangan dapat dilihat pada tabel 15 dibawah ini:

Tabel 15

Hasil dari penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan

No.	Alternatif	Jumlah	Presentase
1.	Ganti rugi	0	0%
2.	Pengembalian uang	0	0%
3.	Penggantian barang	0	0%
4.	Tidak ada	2	100%
n = 2			100%

Sumber: Data lapangan yang diolah (konsumen).

Berdasarkan tabel 15. Menunjukkan bahwa konsumen yang mengajukan keluhan dan penyelesaian lewat jalur musyawarah sebanyak 2 orang (100%), sebagian besar konsumen menyatakan bahwa tindakannya hanya sebagai teguran bagi pedagang/pelaku usaha bahwa tindakannya telah diketahui konsumen dan tanpa mengharapkan pengganti barangnya yang kurang karena hanya berkurang beberapa gram saja dari berat yang semestinya.

Pengetahuan konsumen terhadap timbangan yang layak untuk digunakan oleh para pedagang/pelaku usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 16

**Pengetahuan konsumen mengetahui timbangan yang layak digunakan
bagi pedagang/pelaku usaha**

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui	0	0%
2.	Tidak mengetahui	3	100%
n = 3			100%

Sumber: Data lapangan yang diolah (konsumen).

Berdasarkan tabel 16. Dapat dilihat bahwa sebagian besar yaitu 100% konsumen yang tidak mengetahui tentang timbangan yang layak yang seharusnya digunakan oleh para pedagang/pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan konsumen masih rendah. Sehingga sangat penting bagi konsumen cerdas dalam membeli barang untuk selalu memperhatikan alat

ukur yang digunakan dalam penjualan tersebut, apakah sudah ditera atau belum dengan melihat langsung tanda tera yang terpasang pada lemping atau biji timah yang di cap. Apabila diketahui alat ukur tersebut belum ditera dan atau ditera ulang, maka adalah suatu kewajiban bagi konsumen untuk melaporkan langsung pada instansi terkait Metrologi Legal yang berlaku di wilayah tempat konsumen membeli barang atau produk tersebut. Dimana dalam hal ini instansi yang terkait yaitu Unit Pelayanan Kemetrolgian Kota Tegal. Sebagaimana tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, maka untuk melindungi konsumen dinyatakan bahwa seluruh alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam perdagangan adalah wajib tera. Dengan menggunakan timbangan yang sudah ditera dan ditera ulang maka kebenarannya dalam hal pengukuran, penakaran dan/atau penimbangan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini konsumen cerdas akan mendapatkan barang yang sesuai dengan permintaan.

Pengetahuan konsumen tentang adanya hukum perlindungan bagi konsumen dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 17**Pengetahuan konsumen tentang adanya hukum perlindungan konsumen**

No.	Alternatif	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui	0	0%
2.	Tidak mengetahui	3	100%
n = 3			100%

Sumber: Data lapangan yang diolah (konsumen).

Berdasarkan tabel 17. Dapat dilihat bahwa sebagian besar sebanyak 100% konsumen tidak mengetahui adanya hukum perlindungan konsumen. Pengetahuan tentang adanya hukum perlindungan konsumen penting untuk diketahui oleh para konsumen agar konsumen mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen.

Berdasarkan UUPK pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, diharapkan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang dan selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum ini meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk pemberdayaan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pedagang/pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pedagang/pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminim mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pedagang/pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui peyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal

ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki hak dan kewajiban, pengetahuan hak-hak konsumen yang sangat penting agar konsumen bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika diketahui adanya tindakan yang tidak adil terhadap konsumen, konsumen bisa secara spontan menyadari hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya, dengan kata lain konsumen tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara di instansi terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal yang sudah diolah penulis, antara lain:

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam bidang seksi pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan usaha perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja di seksi pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan.

2. Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan usaha perdagangan.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan.
4. Pelaksanaan koordinator dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan usaha perdagangan.
5. Pelaksanaan urusan pemeritah dan pelayanan umum di bidang pembinaan, pengawasan usaha perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pembinaan dan pengawasan di bidang usaha perdagangan pada kabupaten/kota.
7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan usaha perdagangan.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pengawasan usaha perdagangan.
9. Pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan, pengawasan usaha perdagangan yang diserahkan kepada kepala bidang.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terkait *Shortweighting* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Makanan Industri Rumah Tangga

Perlindungan konsumen sering kali disepelekan oleh para pelaku usaha. Tak jarang banyak pelaku usaha yang tega berbuat curang pada kepada konsumen yang nantinya akan merugikan konsumen demi tercapainya keuntungan yang maksimal atau untuk menekan ongkos produksi mereka. Dan lebih parahnya lagi jika konsumen tidak menyadari akan perbuatan curang para pelaku usaha tersebut. Kepuasan konsumen seolah tidak ada harganya bagi sang pelaku usaha. Mereka mementingkan kepuasan mereka sendiri, miris sekali rasanya mendengar banyak konsumen diperlakukan curang oleh pelaku usaha, padahal secara eksplisit telah disebutkan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dalam UUPK.

Sangat disayangkan sekali, UUPK yang telah dibuat untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kesejahteraan konsumen justru tidak terlaksana dengan baik tetapi tetap saja ada pelanggaran. Selain itu berdasarkan pengamatan dan informasi yang dihimpun, membuktikan bahwa peraturan atau ketentuan yang berlaku tidaklah cukup untuk mewujudkan pelaksanaan kewajiban bagi para pedagang/pelaku usaha untuk menjual produk/barang yang sesuai dengan berat bersih sesuai dengan etiket barang tersebut. Melainkan juga dibutuhkannya pembinaan dan pengawasan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan tinggi terhadap hal tersebut.

Didalam UUPK Pasal 8 ayat (1) sudah sangat jelas mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Selain itu, dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa pelaku usaha berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang meliputi:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket keterangan barang tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket keterangan barang tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label atau etiket keterangan barang tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang paling baik dalam atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang tercantum dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih, atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha tersebut dilarang memperdagangkan produknya jika tidak mengikuti ketentuan Pasal 8 UUPK tersebut. Disebutkan pada Pasal 8 ayat (4)

UUPK, menyebutkan bahwa: pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Menurut Bapak Ari Prasetya, selaku Kepala Seksi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal, menyatakan bahwa: masih banyak ditemukan pedagang/pelaku usaha yang melakukan pelanggaran menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang dinyatakan dalam label atau etiket barang. Adapun sanksi yang diberikan kepada para pedagang/pelaku usaha berupa:

1. Produk/barang tidak boleh dipajang;
2. Memberikan teguran kepada pelaku usaha terakhir;
3. Apabila teguran tertulis tidak diindahkan/dihiraukan berturut-turut 3 (tiga) kali, maka Pemerintah Kota Tegal akan membekukan izin usaha melewati Badan Perizinan Pelayanan Terpadu.

Tindakan pedagang/pelaku usaha yang diketahui melakukan pelanggaran mengenai pengurangan timbangan sanksinya berupa teguran, namun sanksi administratif dan menyita timbangan merupakan sanksi yang jarang diberikan karena masih dalam batas toleransi yang diijinkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Bapak Ari Prasetya, belum ada konsumen yang mengajukan keluhan tentang pedagang/pelaku usaha yang menjual produk/barang yang

tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label barang. Padahal pedagang/pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan tersebut bisa dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana yang berupa: adapun ketentuan pidana yang terkait Pasal 8 ini, adalah terdapat pada Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah).

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan sesuai Pasal 63 berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah berhenti kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Ketentuan lainnya yang terkait konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada etiket barang tersebut, terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun

1981 tentang Metrologi Legal akan dijerat dengan hukuman sebagaimana dalam Pasal 32 yaitu :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Konsekuensi hukum bagi pelanggar yaitu pelaku usaha yang menjual produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih sesuai dengan etiket barang tersebut, yaitu terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Secara lengkap tercantum pada ketentuan pidana Pasal 139, Pasal 141, dan Pasal 144 yang berbunyi :

Pasal 139

Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 141

Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 144

Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Aspek perlindungan konsumen dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melampaui batas, sebagaimana Pasal 258 ayat (1) yaitu “barang siapa memalsukan, ukuran dan takaran, anak timbangan, atau timbangan sudah dibubuhi tanda tera dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Adanya perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

Untuk menekan jumlah pelanggaran terhadap produk/barang yang tidak sesuai dengan berat bersih sebagaimana tercantum dalam etiket barang, sehingga terdapat aturan beserta sanksi agar ketentuan tersebut dapat

terrealisasikan atau terlaksanakan dengan baik. Sanksi yang dibuat adalah untuk mewujudkan efek jera bagi para pelanggarnya, dan pemerintah sebaiknya meningkatkan selalu pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di masyarakat agar masyarakat/konsumen merasa dilindungi.

Kegiatan peredaran produk/barang tidak lepas dari pengawasan oleh pihak yang berwenang. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dimaksud yaitu:

1. Pemerintah
2. Masyarakat
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang menerima pengaduan masyarakat/konsumen yang telah mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dibelinya. Komsumen dapat mengadukannya kepada Disperindag, LPKSM dan BPSK.

Adapun lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa konsumen, antara lain :

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
2. Pengadilan Negeri.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tindakan konsumen terhadap pedagang/pelaku usaha yang menjual produk pangan industri rumah tangga yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label kemasan hanya memilih diam saja, dan sebagian konsumen memberikan teguran bagi pedagang/pelaku usaha bahwa tindakannya telah diketahui konsumen.
2. Konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk pangan industri rumah tangga yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada label kemasan, diatur secara umum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Metrologi Legal. Disperindag Kota Tegal melakukan pengawasan langsung di lapangan bekerjasama dengan Unit Kemetrologian Kota Tegal, memberikan saksi kepada pedagang/pelaku usaha yang diketahui melakukan praktek curang dengan sanksi berupa teguran. Tetapi perlindungan hukum bagi konsumen belum terpenuhi secara keseluruhan, utamanya berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi akibat kerugian yang dialami konsumen.

B. Saran

1. Sebagai pedagang/pelaku usaha seharusnya lebih memperhatikan kepentingan konsumen untuk mendapatkan kepercayaan agar tidak beralih ke pedagang/pelaku usaha lain. Menjamin kepastian mutu barang baik kualitas maupun kuantitas, dan mengikuti aturan hukum yang berlaku harus senantiasa diperhatikan. Dengan demikian, konsumen akan merasa haknya terjamin, tidak dicurangi dan tidak dikurangi haknya.
2. Bagi Disperindag diharapkan untuk dapat meningkatkan pengawasan kepada para pedagang/pelaku usaha, baik mengenai perbuatannya dalam melakukan transaksi dengan konsumen maupun produk-produk yang diperdagangkan, terutama tidak segan untuk menindak sesuai aturan hukum yang memberikan efek jera kepada pedagang/pelaku usaha yang melakukan kecurangan seperti menjual produk pangan industri rumah tangga yang tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum pada eiket barang. Sehingga tidak ada lagi pedagang/pelaku usaha yang melakukan peraktek curang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet.ke-7, 2014.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusamedia, Cet. ke-1, 2010.
- Damiati, *Perilaku Konsumen*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2015.
- Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-4, 2014.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Asas dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Martolusuma, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rsodakarya, 2017.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____, dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-9, 2015.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004.

- Sidabalok, Jeanus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soemitro, Romy Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sudjana, dan Gultom, Elisantris, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: CV. Keni Media, 2016.
- Sumarwan, Ujang, *Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Suteki, dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2018.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

Jurnal

- Ernawati, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Pangan Industri Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2017.

- Elvira, Rose Linda, Setyawan, Fendi, dan Adi Wibowo, Yusuf, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Akibat Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2013.
- Hendri dan Oktarina, Neneng, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kemasan Pelaku UMKM Yang Tidak Mencantumkan Label Pangan”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Kurniawati, Komang Prayuda Devi, dan Ariana, I Gede Putra, “Ketidaksesuaian Pencantuman Ukuran Yang Terdapat Pada Kemasan Dengan Produk Aslinya (Studi Pada Mini Mart Di Sesetan Denpasar)”, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2017.
- Oktiva, Raifina dan Susiana, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- S., Suryadiansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Label Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Provinsi Riau”, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2017.
- Thahara, Asri Wahyu, “Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)”, *Jurnal Hukum*, 2013.

Skripsi

- Muttaqin, Hendra, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang, 2016.
- Pechler, Rendy Aditya, “Pelanggaran Hak-Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan Dalam Kemasan (Studi Kasus Sengketa antara Toko Hokky Surabaya dan Ibu Fonny)”, Skripsi Sarjana Hukum, Surabaya, 2011.
- Ratnasari, Ayu, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Isi Produk Biskuit Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih pada Label Kemasan”, Skripsi Sarjana Hukum, Jember, 2018.

Wawancara

- Wawancara dengan Solikhin, Produsen UD. Sari Murni Tegal, di Kota Tegal, tanggal 24 Januari 2020 jam 09.30 WIB.

Wawancara dengan H. Daka, Produsen UD. Sami Jaya, di Kota Tegal, tanggal 24 Januari 2020 jam 11.00 WIB.

Wawancara dengan Sukono, Produsen Kerupuk Baraya, di Kota Tegal, tanggal 25 Januari 2020 jam 10.00 WIB.

Wawancara dengan Dimiyati, Produsen UD. Mekar Jaya, di Kota Tegal, tanggal 25 Januari 2020 jam 13.00 WIB

Wawancara dengan Karipah, Produsen Margo Roso, di Kota Tegal, tanggal 25 Januari 2020 jam 15.00 WIB

Wawancara dengan Badriyatun, Konsumen Produk Makanan Industri Rumah Tangga, di Toko Swalayan Mitra, tanggal 12 November 2019 jam 20.30 WIB.

Wawancara dengan Ramdani, Konsumen Produk Makanan Industri Rumah Tangga, di Minimarket Rita Jaya, tanggal 12 November 2019 jam 19.50 WIB.

Wawancara dengan Suyatmi, Konsumen Produk Makanan Industri Rumah Tangga, di Minimarket Sahabat, tanggal 12 November 2019 jam 19.00 WIB.

Wawancara dengan Ari Prasetya, Kepala Seksi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal, tanggal 13 Desember 2019 jam 10.00 – 11.30 WIB.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Kota Tegal
Telp. / Faks. (0283) 351452 Kode Pos - 52123

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN IJIN RISET

Nomor : 071 / 204 / X / 2019

- I. DASAR : Surat Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal
Nomor : 070/209/2019 tanggal 15 Oktober 2019
- II. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal tidak keberatan atas pelaksanaan Ijin Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **DEVI ARIYANI**
 2. Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
 3. Alamat : RT. 01 RW. 03 Tunon Kecamatan Tegal Selatan.
 4. Penanggung jawab : **Dr. M. Achmad Irwan Hamzani**
 5. Maksud/Tujuan/Riset/
Penelitian/Kerja Praktek : **Perlindungan Konsumen Terhadap Shortweighthing ditinjau dari UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**
 6. Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal.
 7. Peserta : 1 (satu) orang.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang tidak dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Sebelum pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang, terlebih dahulu mengajukan surat permohonan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang kepada Instansi lokasi penelitian.
- c. Pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang kepada Responden masyarakat, terlebih dahulu melaporkan kepada Instansi terkait.
- d. Setelah Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang agar menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kota Tegal.
- e. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang / ini berlaku dari tanggal : 16 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Dikeluarkan di : TEGAL

Pada Tanggal : 15 Oktober 2019

a.n. KEPALA BAPPEDA KOTA TEGAL
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

u.b. KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
DAN PENGKAJIAN



ATIE SOLIKHATI, S.Sos.

NIP. 19730327 199803 2 007

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kota Tegal;
2. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal;
3. Arsip;







SALE BASAH

Komposisi :
Pisang Pilihan

Berat : gram

Digunakan Sebelum :

1	2	3	4	5	6	2020	2021	2022
7	8	9	10	11	12	2023	2024	2025



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Devi Ariyani
NPM : 5116500048
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 5 Desember 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Bulukumba Tunon Tegal Selatan
Kota Tegal

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri 1 Tunon	2003	2009
2	SMP Negeri 19 Tegal	2009	2012
3	SMA Negeri 2 Tegal	2012	2015
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2016	2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 27 Januari 2020

Hormat saya,

(Devi Ariyani)